

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS  
KINERJA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING  
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)**

**Indriani Yulia Friska<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, ikaindrianiyf@gmail.com

**ABSTRAK**

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empirik apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jambi dengan menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel moderasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, implementasi, pelaporan anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan secara parsial hanya variabel implementasi dan pelaporan saja yang berpengaruh positif. Sementara itu, komitmen organisasi hanya dapat memoderasi implementasi anggaran saja.

**Kata Kunci :** Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Perencanaan Anggaran, Implementasi Anggaran, Pelaporan Anggaran, Evaluasi Kinerja, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada dasarnya anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan terutama untuk organisasi privat atau swasta, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Pemerintah daerah dituntut tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan, melainkan juga melakukan akuntabilitas horizontal, yaitu pelaporan kepada DPRD dan masyarakat luas (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas melalui anggaran meliputi perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006). Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 2002). Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Anggaran berbasis kinerja menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penerapan anggaran berbasis kinerja dikatakan berhasil, jika realisasi anggaran tercapai dengan maksimal dan keseluruhan proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja dapat tercapai dari semakin maksimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja, ditinjau dari baiknya perencanaan anggaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah, persentase realisasi anggaran yang maksimal dan laporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel. Disamping itu di akhir anggaran, tentunya dilakukan evaluasi dan perbaikan atas kelayakan anggaran tahunan yang telah dilaksanakan. Pentingnya dilakukan penelitian ini

adalah melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, dimana kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Dalam LAKIP yang terpublikasikan dari tahun 2010 sd 2013 dipaparkan bahwa pada tahun 2013 terjadi penurunan persentase pencapaian APBD secara keseluruhan jika dibandingkan dengan LAKIP sebelumnya. Rendahnya realisasi anggaran pada bagian-bagian tertentu, menunjukkan masih belum maksimalnya proses perencanaan, implementasi dan pelaporan pada penerapan anggaran berbasis kinerja. Kesalahan belum diketahui secara pasti, apakah bermula dari perencanaan anggaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan, implementasi anggaran yang menemui banyak kendala, atau pelaporan dalam bentuk LAKIP yang masih belum memaparkan tingkat pencapaian kinerja secara detail sesuai dengan aturan terkait dan masih banyak format penyampaian LAKIP yang tidak seragam antar SKPD. Hal-hal semacam itulah yang hendaknya perlu dikaji ulang setiap tahunnya. Hal tersebut disinyalir dapat berdampak pada menurunnya tingkat akuntabilitas kinerja di Provinsi Jambi. Bagi aparatur dan SKPD, anggaran berbasis kinerja dapat digunakan sebagai sarana untuk mendorong setiap tingkat kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan aktivitas berdasarkan skala prioritas daerah, tugas pokok, fungsi serta tujuan serta sasaran, serta terjaminnya sinkronisasi aktivitas dan terhindarnya tumpang tindih aktivitas. Untuk Pemerintah Provinsi Jambi, berdasarkan data APBD tahun 2010 s.d tahun 2013, secara keseluruhan masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang realisasinya masih kurang maksimal. Dari rangkuman LAKIP terakhir di tahun 2013 diketahui masih ada beberapa tingkat pencapaian anggaran yang masih dibawah 70% yang dilakukan oleh SKPD di Provinsi Jambi.

### 1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada paparan yang dijelaskan pada sub bab latar belakang, masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
- 1.2.2 Apakah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?

- 1.2.3 Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Jambi.
- 1.3.2 Untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Jambi.
- 1.3.3 Untuk menguji pengaruh moderasi komitmen organisasi terhadap pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Jambi.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Kajian Pustaka

Anggaran berbasis kinerja adalah “*a continuum that involves the availability and use of performance information at each of the various stages of the budget process- budget preparation, budget approval, budget execution, and audit evaluation*” (Joyce and Sieg, 2000). Anggaran Berbasis Kinerja atau disingkat (ABK) merupakan metode penganggaran untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja (Anggraini, 2010)

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan- kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut Kurniawan (2009). Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja *output*. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002). Anggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan evaluasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-

sumber *input* dan bagaimana keterkaitannya dengan *output/outcomes* untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

### 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

Proses perencanaan anggaran diawali dengan penyusunan rencana strategis organisasi. Perencanaan strategis yang dibuat harus berorientasi pada keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai *stakeholders* utama. Berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan tersebut setiap tahunnya dituangkan dalam suatu rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang didalamnya memuat seluruh indikator dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi instansi dalam menyelenggarakan pemerintah untuk satu periode tahunan. Anggaran yang disusun adalah anggaran dengan pendekatan kinerja karena dalam anggaran ini dapat merefleksikan hubungan antara aspek keuangan dari seluruh kegiatan dengan sasaran strategis maupun rencana kinerja tahunannya.

Rencana anggaran tahunan diajukan kepada legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan maka terbitlah rencana anggaran tahunan yang disetujui oleh legislatif. Berdasarkan rencana anggaran tahunan yang telah disetujui masing – masing instansi menyusun rencana operasional tahunan. Rencana operasional biasanya termasuk jadwal kegiatan dan penyediaan sumber daya. Semua SKPD harus menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam penjabaran anggaran yang sudah ditetapkan untuk tiap-tiap SKPD. Akhir tahun anggaran, setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen kinerja melakukan review, evaluasi dan penilaian atas hasil yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja yang ada dalam kesepakatan kinerja dilaporkan ke dalam suatu laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja meliputi laporan kinerja keuangan dan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya.

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini:

H<sub>1</sub>: Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung jawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

- H<sub>2</sub> : Perencanaan anggaran, berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
- H<sub>3</sub> : Implementasi anggaran berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
- H<sub>4</sub> : Pelaporan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H<sub>5</sub> : Evaluasi Kinerja berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
- H<sub>6</sub> : Komitmen organisasi memperkuat pengaruh perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan anggaran, dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### 3. METODOLOGI

#### 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang terlibat dalam penyusunan anggaran di setiap SKPD Provinsi Jambi. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* karena responden yang dipilih hanyalah responden berkaitan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Peneliti mengambil jumlah sampel maksimal terdiri dari 4 orang aparatur utama dalam SKPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran per SKPD yang terdiri atas Kabag.Keuangan, Kasubbag Verifikasi dan Perjalanan Dinas, Kasubbag Perbendaharaan, dan Kasubbag perencanaan.

#### 3.2 Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang dikaji adalah variabel dependen yaitu perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan anggaran, dan evaluasi kinerja. Sementara itu yang menjadi variabel independenya adalah akuntabilitas kinerja dan variabel moderatingnya adalah komitmen organisasi.

#### 3.3 Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan terdiri dari analisis regresi linear berganda dan *Moderate Regression Analisis* (MRA) Kedua metode ini menggunakan bantuan komputer melalui program *SPSS (Statistical Product and Service Solutions)*. Persamaan statistika yang digunakan dalam penelitian diuraikan seperti berikut ini:

3.3.1 Untuk melihat pengaruh perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan anggaran, dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja SKPD di Provinsi Jambi, digunakan persamaan sebagai berikut

$$\text{Model 1 : } Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Sumber : Ghozali, 2010

3.3.2 Untuk melihat pengaruh perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan anggaran, dan evaluasi kinerja melalui komitmen organisasi sebagai variabel moderasi terhadap akuntabilitas kinerja SKPD di Provinsi Jambi, digunakan persamaan sebagai berikut:

Model 2 :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 |X_1 - X_5| + \beta_7 |X_2 - X_5| + \beta_8 |X_3 - X_5| + \beta_9 |X_4 - X_5|$$

Sumber : Ghozali, 2010

Keterangan :

Y	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
X1	: Perencanaan Anggaran
X2	: Implementasi/Pelaksanaan Anggaran
X3	: Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran
X4	: Evaluasi Kinerja
X5	: Komitmen Organisasi
X <sub>1</sub> - X <sub>5</sub>	: Interaksi antara perencanaan anggaran dengan komitmen organisasi
X <sub>2</sub> - X <sub>5</sub>	: Interaksi antara pelaksanaan anggaran dengan komitmen organisasi
X <sub>3</sub> - X <sub>5</sub>	: Interaksi antara pelaporan anggaran dengan komitmen organisasi
X <sub>4</sub> - X <sub>5</sub>	: Interaksi antara evaluasi kinerja dengan komitmen organisasi
β <sub>0</sub>	: Konstanta
β <sub>1</sub> - β <sub>9</sub>	: Koefisien regresi
e	: Error term

### 4. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factors*). Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Berdasarkan dari tabel diatas, model regresi yang diajukan untuk variabel independen semuanya terbebas dari multikolinearitas.

**Tabel. 1**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Nilai Inflation Factor (VIF)
Perencanaan Anggaran	1,254
Implementasi Anggaran	4,718
Pelaporan Anggaran	4,549
Evaluasi Kinerja	6,913

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedasitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah metode chart (diagram scatterplot). Dalam penelitian kali ini variabel yang diuji tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Sementara itu untuk persamaan statistik model 1 dalam penelitian kali ini, dilakukan dengan hasil uji regresi linear berganda dan disajikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel. 2**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model 1**

Keterangan	Koefisien	Signifikansi
Konstanta	0,727	0,000
Perencanaan Anggaran	0,039	0,686
Implementasi Anggaran	0,290	0,001
Pelaporan Anggaran	0,422	0,000
Evaluasi Kinerja	-0,173	0,106
Komitmen Organisasi	0,50	0,539
R		0,578
Adjusted R <sup>2</sup>		0,564
F		41,168
Probabilitas F		0,000

Sumber: Data Diolah

Dari hasil analisis statistic pada table 2 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,744 + 0,087 X_1 + 0,287 X_2 + 0,421 X_3 - 0,176 X_4$$

Nilai koefisien determinasi atau R square yang diperoleh sebesar 0,577 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ada pada Pemerintah Provinsi Jambi dipengaruhi oleh variabel perencanaan anggaran, implementasi/pelaksanaan anggaran, dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja sebesar 57,7%, dan sisanya 42,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan uji simultan yang telah dilakukan , F hitung sebesar 51,578 dengan hasil tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang menunjukkan nilai yang signifikan. Berdasarkan hasil uji parsial, dengan melihat signifikansinya diketahui bahwa variabel implementasi anggaran dan pelaporan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan dua variabel lain, yaitu perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja tidak berpengaruh.

Sementara itu, untuk melihat bagaimana pengaruh variabel moderating, yaitu komitmen organisasi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam table di bawah ini:

**Tabel. 3**  
**Hasil Uji Regresi Berganda dengan Variabel Moderatin**

Keterangan	Koefisien	Signifikansi
Konstanta	2,088	0,000
Perencanaan Anggaran	-0,170	0,100
Implementasi Anggaran	-0,741	0,015
Pelaporan Anggaran	0,353	0,000
Evaluasi Kinerja	0,778	0,009
Komitmen Organisasi	0,290	0,022
Interaksi X1X5	-0,209	0,136
Interaksi X2X5	1,470	0,002
Interaksi X3X5	-0,176	0,112
Interaksi X4X5	-1,384	0,002
R		0,626
Adjusted R <sup>2</sup>		0,603
F		27,192
Probabilitas F		0,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014

Dari tabel diatas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut :

$$Y = 2,088 - 0,170 X_1 - 0,741 X_2 + 0,353 X_3 + 0,778 X_4 + 0,290 X_5 - 0,290 | X_1 - X_5 | + 1,470 | X_2 - X_5 | - 0,176 | X_3 - X_5 | - 1,384 | X_4 - X_5 |$$

Pengaruh komitmen organisasi yang memperkuat variabel terjadi pada variabel implementasi anggaran, dimana implementasi anggaran setelah dimoderasi oleh variabel komitmen organisasi menunjukkan koefisien yang naik (1,470) dari tanpa dimoderasi (0,290) oleh komitmen organisasi. Sementara pada variabel evaluasi kinerja, variabel komitmen organisasi justru memperlemah pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemampuan variabel komitmen organisasi hanya ditunjukkan pada satu variabel saja untuk memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harisman (2012) yang menunjukkan komitmen organisasi bisa mempengaruhi lancarnya proses penerapan anggaran berbasis kinerja.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian ini menggunakan proksi perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja serta komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja memang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara simultan. Tetapi hanya implementasi anggaran dan pelaporan anggaran yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan komitmen organisasi tidak dapat memoderasi dari keempat variabel independen tadi.

### 5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini:

- 5.2.1 Penelitian ini hanya membahas 4 (empat) variabel independen yang berhubungan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dan 1 (satu) variabel yang dijadikan moderating. Variabel lain diabaikan dan dianggap tidak mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 5.2.2 Karena keterbatasan waktu dan tenaga, penelitian ini hanya meneliti pada SKPD sehingga hasilnya hanya mencerminkan kondisi yang ada pada SKPD tersebut dan tidak dapat digeneralisasi pada semua keadaan.
- 5.2.3 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi jawaban melalui kuesioner yang diberikan sehingga kadang timbul perbedaan interpretasi atas maksud dan tujuan pernyataan

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran – saran sebagai berikut :

- 5.3.1 Proses perencanaan anggaran di Provinsi Jambi sebaiknya dilakukan dengan lebih baik dan matang lagi. Perencanaan yang baik selalu mempertimbangkan konsep *value for money*, yang mengedepankan nilai ekonomis, efektif dan efisiennya suatu program kerja untuk dijalankan selama satu periode pelaporan. Perencanaan yang tepat guna akan memudahkan proses penerapan anggaran berbasis kinerja terutama dalam perwujudan akuntabilitas kerjanya.

- 5.3.2 Dalam melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jambi sebaiknya lebih memonitoring pelaksanaan program/kegiatan seberapa jauh pelaksanaannya dan memperbaiki sistem akuntansi keuangan daerah dalam hal pencatatan penggunaan anggaran.

- 5.3.3 Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel – variabel lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bisa mengambil sampel yang lebih luas.

## DAFTAR REFERENSI

- Amir, Amri & Junaidi, dkk. 2009. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Terapannya. Bogor: IPB Press.
- Anggraini, Yunita. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- DEPUTI IV BPKP. (2005). *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta: BPKP.
- Harisman. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasi dalam Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Kabupaten Sleman. *Jurnal Ekonometrika UNDIP*, volume 11 No.2
- Herawati, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, (Online), Volume 13 No. 2,
- Julianto. (2009). *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja SKPD di Pemkab Tebing Tinggi*. Tesis. USU. Sumatera Utara.
- Junaidi (2010). ORDI. Melalui <http://junaidichaniago.wordpress.com>
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Muda, Taufik Djundjung. (2005). *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota*

*Kotamadya Jakarta Selatan*. Disertasi.  
UNPAD. Jawa Barat.

Nina Widiawati Heti. (2009). *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi*. Tesis. UNPAD. Jawa Barat.

Nugroho, Yohanes Anton. 2011. *Olah Data dengan SPSS*. Yogyakarta: PT. Skripta Media Creative.

Pusdiklatwas BPKP.2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi 5. Jakarta.